

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

Lingkan Juliana Tumilaar, Freddy S. Kawatu, Jaqueline E.M. Tangkau

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

E-mail: lingtumilaar@gmail.com

Abstrak: Laporan Keuangan pemerintah adalah tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penyajian Laporan keuangan bertujuan Mengungkapkan posisi keuangan selama periode tertentu pada satuan kerja perangkat daerah, informasi keuangan ini dapat di gunakan untuk dibandingkan dengan laporan pada periode sebelumnya atau dengan entitas lainnya, dan juga bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan oleh sebab itu penyajian laporan keuangan harus di buat sebaik baik mungkin sehingga dapat bersifat akuntabel dan transparan. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah mengacu pada PSAP 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dengan adanya kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi baik nya suatu laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai PSAP 71. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode Analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dari Hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyajian Laporan keuangan yang di buat telah sesuai dan mengacu pada PSAP 71.

Kata Kunci: Analisis, Penyajian, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan.

Abstract: Government financial statements serve as a standard by which the government measures its performance of its obligations. In order to be accountable and transparent, the presentation of financial statements must be done as well as possible. This is because the financial information can be used to compare reports from previous periods or with other entities, and it can also help users make decisions. The presentation of financial statements aims to reveal the financial position for a specific period in the work unit of the regional apparatus. With the existence of regulations that may impact a financial report's quality, the government presents its financial statements in accordance with PSAP 71 of 2010 concerning Accrual-based Government Accounting Standards. This study aims to assess how local government financial reports are presented in accordance with PSAP 71. This kind of study uses the descriptive analysis approach and is qualitative in nature. techniques for gathering information from documents and interview findings. The study's findings show that the financial accounts were presented appropriately and in accordance with PSAP 71.

Keyword: Analysis, Presentation, Financial Statements, Government, Accounting Standards.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang baik tentunya dibutuhkan suatu alat atau prosedur untuk mendukung laporan tersebut, sehingga dibentuklah suatu sistem yang dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan juga berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sistem sebagai sekumpulan komponen yang saling terkait secara konsisten sehingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan hukum adalah aturan atau adat istiadat yang secara formal diakui mengikat dan disahkan oleh pemerintah atau penguasa.

Memberikan informasi Keuangan untuk memantau kinerja kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kontrak yang disepakati dan kondisi yang di persyaratkan (Freddy S. Kawatu

2019). Untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berfungsi dengan baik, harus ada undang-undang atau peraturan yang mengatur akuntansi, karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai entitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan landasan yang kokoh bagi pengelolaan yang baik dalam industri akuntansi. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah yang menggunakan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan oleh PP No. 71 Tahun 2010. SAP akan digunakan untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Apabila laporan keuangan disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan disusunnya laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan dari sektor publik memberikan gambaran yang terorganisasi mengenai keadaan keuangan sebagai hasil dari transaksi yang telah diselesaikan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, menilai kinerja manajerial dan organisasi, serta berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dan manajemen merupakan tujuan utama pelaporan keuangan sektor publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tomohon sebagai pengguna anggaran juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai sarana pertanggungjawaban. Setiap Daerah (Kota/Kabupaten) dan Provinsi harus mengikuti peraturan ini sebagai pedoman dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerahnya.

Karena ilmu akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan produk disiplin ilmu, maka setiap ahli harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang transparan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Komposisi, konten, dan penyajiannya semuanya disatukan oleh parameter mendasar, yang dapat mengarah pada pengembangan metode standar untuk membaca dan menganalisisnya (Suryanto & Thalassinis, 2017) dalam (Zebua et al., 2022).

BPK RI menemukan permasalahan, yaitu rendahnya kualitas informasi dalam laporan keuangan daerah akibat kurangnya pengetahuan akuntansi dalam proses penyusunan laporan, yang secara langsung berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia. Sistem pengendalian internal masih lemah, dan sistem informasi akuntansi keuangan belum diterapkan secara efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara penyajian laporan keuangan dengan ketentuan pemerintah saat ini, seperti adanya pos atau pos dalam laporan keuangan yang tidak berpedoman pada PSAP 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, diharapkan penyajian laporan keuangan pada instansi pemerintah dapat didasarkan pada akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan PSAP 71.

Oleh karena itu di harapkan penyajian laporan keuangan pada instansi pemerintah di harapkan berbasis akuntansi yang baik dan benar sesuai PSAP 71. Hal ini yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan dengan tujuan menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Definisi akuntansi, menurut Niswonger (1995), Fess dan Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga menyatakan bahwa "Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan".

Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada). (Miran, 2023)

Akuntansi menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) (1970): "Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya

Sistem informasi akuntansi memiliki berbagai elemen penting dalam siklus akuntansi mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak. (Pratiwi, A. D., Kambey, J. P., & Moroki, F. O. (2023)

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Gagasan mendasar di balik fungsi akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, di mana tujuan keseluruhan akuntansi sektor publik adalah menyajikan data keuangan yang diperlukan. Akuntabilitas tersebut berbentuk laporan keuangan karena ada sejumlah alasan internal pemerintah mengapa laporan keuangan diperlukan.

Akuntansi sektor publik, menurut Bastian (2014:6), adalah sistem metode dan analisis akuntansi yang digunakan oleh lembaga negara yang lebih tinggi dan departemen di bawahnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan publik yang beragam.

Namun, Mardiasmo (2014:14) Akuntansi untuk sektor publik merupakan alat manajemen atau informasi publik yang digunakan oleh pemerintah. Dibandingkan dengan era lain, prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi pemerintah saat ini semakin mendapat perhatian.

Proses pengumpulan, pendokumentasian, pengkategorian, evaluasi, dan pelaporan transaksi keuangan entitas publik yang menyediakan data keuangan bagi pembaca laporan keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan dikenal sebagai akuntansi sektor publik.

Akuntansi Pemerintah

Menurut Wiratna Sujarweni (2022), akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang mengatur keuangan negara, meliputi anggaran, pelaksanaannya, pelaporannya, dan segala pengaruhnya.

Proses identifikasi, kuantifikasi, dokumentasi, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan entitas pemerintah yang dimanfaatkan sebagai data dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah yang memerlukannya, sebagaimana yang didefinisikan Abdul Halim (2016) sebagai akuntansi pemerintahan.

PSAP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 mengatur laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berupaya meningkatkan daya banding laporan keuangan terhadap anggaran, antarperiode, dan antarbisnis. Prinsip

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dikenal sebagai standar akuntansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menetapkan standar akuntansi pemerintah. Mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah, SAP disajikan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang juga mencakup pengantar standar akuntansi pemerintah. (2010) PP No. 71.

Komponen Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP 71

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang transparan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Komposisi, isi, dan penyajian laporan keuangan semuanya disatukan oleh parameter fundamental, yang dapat mengarah pada pengembangan metode standar untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan (Suryanto & Thalassinou, 2017) dalam (Zebua, D. T. S., Manarinsong, J., & Moroki, F. 2022)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan adalah memberikan informasi yang sangat relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di perusahaan. (Sumber: Widiastoeti & Sari (2020), dalam Joni, & Manarinsong J, 2023)

Laporan keuangan merupakan representasi data yang menggambarkan atau menjelaskan situasi entitas, yang memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kinerja keuangan entitas tersebut. Simanjuntak, N. Sumual, T., dan Bacilius A (2020)

Komponen penyajian laporan keuangan pemerintahan berdasarkan PP No.71 tahun 2010 terdiri dari 7 laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam investigasi ini. Metode deskriptif adalah teknik yang menganalisis dan mengkarakterisasi fakta atau hasil sebagaimana adanya, tanpa mencoba menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk khalayak yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan tujuh komponen laporan keuangan yang digunakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng hanya memiliki lima bagian, yaitu Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karena memang sudah dalam kondisi yang baik jika berdasarkan pos-pos yang digunakan dalam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah mematuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sesuai hasil penelitian. Karena saldo dana sudah disajikan dengan modul yang lebih optimal dari bagian pengelolaan keuangan, dan karena pengelola keuangan daerah menyajikan laporan arus kas dari seluruh arus kas keluar dan seluruh arus kas masuk instansi, maka Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas tidak dicantumkan dalam pos-pos laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai PSAP 71

Laporan keuangan yang disajikan di badan pendapatan daerah ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini disertai dengan lampiran berupa daftar yang menjadi acuan pos-pos laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan. Seluruh pendapatan LRA, pendapatan/penerimaan dan pengeluaran LO, dan beban/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran disajikan dalam beberapa entri dalam laporan keuangan ini. Badan pendapatan daerah termasuk dalam entitas akuntansi karena merupakan satuan kerja perangkat daerah, khususnya sebagai pengguna anggaran, sehingga hanya menyampaikan kelima laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 termasuk laporan keuangan berbasis akrual yang disajikan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh mengenai keberadaan entitas akuntansi dan pelaporan, Badan Pendapatan Daerah tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih maupun laporan arus kas karena merupakan satuan kerja perangkat daerah sehingga menjadi entitas akuntansi. Melainkan, pemerintah daerah provinsi yang menjadi entitas pelaporan langsung menyusun laporan tersebut.

Perbandingan penyajian laporan keuangan pada BPKPD Kota Tomohon dengan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP 71)

Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan				
No	Komponen	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.	PSAP 71	Keterangan
1	Tujuan	Menyajikan informasi laporan keuangan yang relevan bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan mengambil keputusan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas.	Mengatur Penyajian Laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan Baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.	Sudah Sesuai
2	Laporan keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Oprasional 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo 3. anggaran lebih 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Oprasional 7. Neraca 8. Catatan Atas Laporan Keuangan	Sudah Sesuai, terkait adanya entitas pelaporan dan entitas akuntansi
3.	Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan informasi realisasi Pendaptan belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, lalu di perbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.	Menyajikan informasi realisasi pendaptan belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, lalu di perbandingkan dengan	Sudah sesuai,

			anggaran dalam satu periode.	
4.	Laporan Oprasional	Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan Oprasional Keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan, beban, surplus pada periode tertentu	Menyediakan informasi Laporan Operasional Badan pendapatanSelama periode 2020 lalu di sandingkan dengan pelaporan sebelumnya.	Sudah sesuai
5.	Laporan Aruskas	Diklasifikasikan Berdasarkan aktivitasOprasional. Pembiayaan dan non Anggaran	-	Tidak membuat laporan aruskas
6.	Laporan perubahan Ekuitas	Menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dinut.	Merupakan laporan penghubung antara laporan oprasiomal dengan neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas Aktivitas oprasional pada tahun pelaporan	Sudah sesuai
7.	Neraca	Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah selama satu periode	Menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utaraper tnggal 31 Desember 2022	Sudah sesuai
8.	Laporan Perubahan Saldo	Basis Akruial	-	Tidak membuat laporan perubahan saldo
9.	Catatan atas laporan keuangan	Meliputi daftar terperinci atas hasil analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas,dan Laporan oprasional.	Meliputi daftar terperinci atas hasil analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporanoprasional.	Telah sesuai

Sumber: Data Diolah, 2023

Karena memiliki fokus tujuan yang sama, maka penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan PSAP yang berlaku, yaitu PSAP 71. Karena laporan arus kas dan penyesuaian saldo awal merupakan kewenangan langsung pemerintah daerah yang sifatnya perbendaharaan, maka Badan Pendapatan telah menyajikan komponen-komponennya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena Badan Pendapatan Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah, maka bukan Badan Pendapatan Daerah yang membuat laporan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun ada sejumlah pos laporan keuangan yang penyajiannya masih berbasis kas, Badan Pendapatan Daerah telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PSAP 71. Dalam hal ini, pencatatan dan pengakuannya baru diakui pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan, yang mempengaruhi penyajiannya. Padahal, penerimaan pendapatan daerah sudah terealisasi. Karena harus

dapat dipercaya kewajarannya dalam pemeriksaan yang bebas dan independen, maka laporan keuangan tersebut menjadi salah satu tolok ukur opini BPK yang menjadi acuan baik atau buruknya pengelolaan keuangan. Audit harus memenuhi persyaratan penilaian kewajaran agar Opini dapat dipercaya.

Kemampuan individu dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya perlu lebih ditingkatkan bagi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon agar dapat menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan yang memanfaatkan laporan keuangan. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan menambah masukan dalam kegiatan penelitian agar dapat memudahkan dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi mengenai Penyajian Laporan Keuangan sesuai PP 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. D. (2022). *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember).
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Freddy Samuel Kawatu. 2019. *Analisis Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit DEEPUBLISH (Group Penerbit CV BUDI UTAMA)
- Halim, A (2018) *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- HARYANTO, H. (2018). Buku: *KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH*.
- Joni, J., & Manaroinson, J. (2023). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Sesuai Sak Emkm Pada Umkm De Harvest Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 149-156.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Republik Indonesia.
- Lasabuda, Anastasya A., Jenny Morasa, And Victorina Z. Tirayoh. "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15.2 (2020): 167-174.
- Malviki, M. A. D. (2021). *Penyajian Laporan Keuangan Dengan Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA).
- Miran, M. . (2023). *Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara)*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4386–4402. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11705>.
- Muliyadi (2016) " *Sistem Informasi Akuntansi*" Jakarta.Salemba empat
- Permana, Kemas Welly Angga. "Analisis Implementasi Basis Akrua Pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 5.1 (2022): 1-16.
- Pratiwi, A. D., Kambey, J. P., & Moroki, F. O. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi*. EDUPEDIA Publisher, 1-72
- Putra, Septian Asriadi, And Rara Juniar Varina. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 85-98.

- Rizki Pamela, R. (2019). *ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Kantor KPU Kota Solok)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Sari, Yosi Nopita. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrua! Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing." *Juhanperak* 4.1 (2023): 1444-1457.
- Simanjuntak, N. Sumual, T. & Bacilius A. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak-Emkm (Studi Kasus Pada Umkm Restoran Delli DI Tomohon). *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado* Sugiyono. 2019.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahril Effendi, S. E., & Ak, M. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua!*. CV Batam Publisher.
- Varina, Rara Juniar. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Wiratna, S (2022) *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Yogyakarta.
- Zailany, Achmad Haditheo. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua! Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur*. Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2021.
- Zebua, D. T. S., Manaroinson, J., & Moroki, F. 2022. Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.1743>